BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi akad bagi hasil yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras merupakan akad PLS dengan model sepuluh persenan yaitu 10% untuk *pendego* dan 90% untuk juragan dihitung dari laba bersih, jika mengalami kerugian ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing dan akad *revenue sharing* dengan model lima persenan yaitu 5% untuk *pendego* dan 95% untuk juragan dihitung dari total penjualan. Keduanya menggunakan sistem *muzara'ah* yaitu memberikan hak mengelola tanah kepada *pendego* dengan sistem bagi hasil dan bibit disediakan oleh juragan. Bagi hasil akan dilakukan setelah panen selesai. Model yang banyak digunakan dalam masyarakat pertambakan di Desa Mentaras adalah model 5% karena untuk meminimalisir ketidakadilan kepada *pendego*.
2. Dalam implementasi yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras ditemukan beberapa persoalan yaitu: pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai kontrak, terlibat hutang dengan tengkulak, dan pembayaran setoran tidak sesuai kontrak. Cara mengatasi persoalan yaitu: *pendego* dan juragan harus menyaksikan dalam penjualan kepada tengkulak sehingga transaksi pembayaran hasil panen segera diberikan ditempat pelaksanaan transaksi agar tidak terjadi hal menyimpang, juragan bisa memilih alternatif lain untuk mendapatkan modal selain meminjam dari tengkulak

seperti meminjam pada bank keuangan atau lembaga keuangan lainnya, dan seharusnya sebelum jatuh tempo pembayaran setoran pihak penyeter harus menyiapkan uangnya agar bisa membayar tepat waktu sehingga penerima setoran tidak merasa dirugikan.

5.2 Saran

1. Menjadi seorang juragan haruslah bisa memilih alternatif dalam peminjaman modal. Sebaiknya juragan lebih memilih untuk meminjam modal kepada lembaga keuangan lainnya dari pada meminjam kepada tengkulak.
2. Petani tambak bisa meminjam uang kepada POKDAKAN di desa Mentaras jika hanya memerlukan $\pm$ 3 juta tetapi jika melebihi 3 juta petani tambak bisa meminjam kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat cenderung berfikir meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya akan melalui proses yang rumit dan masyarakat berfikir jika tidak bisa membayar hutang tepat waktu akan terjadi penyitaan.
3. Masyarakat masih terbatas pengetahuan tentang produk-produk lembaga keuangan, seharusnya pihak lembaga keuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih memahami dengan jasa keuangan supaya mudah dalam peminjaman modal.